

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi suatu daerah atau suatu negara pada dasarnya merupakan interaksi dari berbagai kelompok, antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi dan lain-lain. Oleh karena itu pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya. Dimana manusia merupakan tenaga kerja, input pembangunan, juga merupakan konsumen hasil pembangunan itu sendiri (Romas, 2013).

Salah satu tujuan penting pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja, yang pertumbuhannya lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk membawa konsekuensi pertambahan jumlah angkatan kerja, angkatan kerja yang tumbuh lebih cepat daripada kesempatan kerja akan memperbesar jumlah pengangguran. Sehingga kegiatan ekonomi harus tumbuh dan berkembang lebih cepat dari pertambahan jumlah orang yang mencari pekerjaan. Keadaan ini sangat diperlukan untuk memperkecil tingkat pengangguran terbuka.

Perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke pasar tenaga kerja, karena ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya pengangguran.

Provinsi Jawa Barat adalah salah satu daerah yang memiliki keunggulan dan peran strategis, baik dari segi geografis maupun ekonomi. Dari sisi geografis, Provinsi Jawa Barat berdekatan dengan Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi yang dijadikan sebagai pusat pasar, keuangan dan permodalan serta pengembangan teknologi. Sedangkan dari sisi ekonomi, selama lima tahun terakhir Provinsi Jawa Barat menjadi penyumbang ekonomi terbesar ketiga setelah provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur. Pada tahun 2014 Provinsi Jawa Barat berada di posisi ketiga sebagai penyumbang ekonomi terbesar dengan presentase sebesar 14,40 persen. Sedangkan posisi pertama dan kedua ditempati DKI Jakarta dan Jawa Timur dengan presentase sebesar 16,46 persen dan 14,40 persen. Jawa Tengah dan Riau berada di posisi keempat dan lima sebagai penyumbang ekonomi terbesar, dengan presentase sebesar 8,65 persen dan 6,35 persen.

**Tabel 1.1 Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi**

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
DKI Jakarta	15,66	15,64	15,79	16,09	16,46
Jawa Timur	14,43	14,32	14,40	14,38	14,40
Jawa Barat	13,21	13,06	13,01	13,10	12,95
Jawa Tengah	9,08	8,85	8,70	8,67	8,65
Riau	5,66	6,21	6,44	6,32	6,35

*Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2015*

Kontribusi terbesar dalam pembangunan ekonomi di Jawa Barat secara makro di dominasi oleh sektor industri pengolahan. Terlihat dari kontribusi setiap sektor usaha pada PDRB Jawa Barat setiap tahunnya

yang menunjukkan sektor industri pengolahan menjadi penyumbang yang terbesar bagi PDRB Jawa Barat, seperti terlihat pada Tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.2 Distribusi Persentase Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Dengan Minyak dan Gas Bumi (Dalam Persen)**

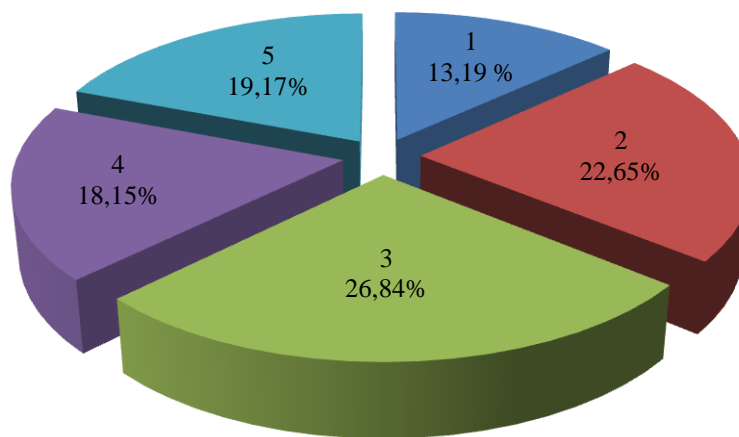
No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Pertanian	13,63	13,08	12,27	11,46	11,19
2.	Pertambangan	2,45	2,32	2,06	1,80	1,69
3.	Industri Pengolahan	43,43	42,08	41,97	41,04	40,75
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	2,33	2,27	2,16	2,22	2,25
5.	Bangunan/Konstruksi	3,40	3,67	3,93	4,20	4,29
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	20,72	21,75	22,08	23,24	23,57
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	4,36	4,76	5,14	5,42	5,60
8.	Keuangan Persewaan dan Jasa	3,18	3,28	3,49	3,62	3,70
9.	Jasa-Jasa	6,50	6,80	6,88	7,00	6,96
PDRB dengan Minyak dan Gas Bumi		100	100	100	100	100

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2010, 2012, 2013, 2014*

Industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar PDRB Jawa Barat dengan rata-rata 41,85 persen, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan dengan rata-rata 22,27 persen dan sektor pertanian rata-rata sebesar 12,32 persen.

Bahkan sektor industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang terbesar kedua menyerap tenaga kerja setelah sektor perdagangan. Penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat dapat dilihat dari presentasi penduduk bekerja di berbagai lapangan pekerjaan utama. Berdasarkan data pada Gambar 1.1, terlihat bahwa sektor perdagangan merupakan lapangan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja paling besar dibandingkan dengan sektor lainnya dengan persentase sebesar 26,84 persen. Sektor penyerap tenaga kerja kedua adalah sektor industri pengolahan 22,65 persen, kemudian diikuti dengan

penyerapan tenaga kerja sektor lain sebesar 19,17 persen, jasa kemasyarakatan 18,15 persen, dan pertanian sebesar 13,19 persen. Untuk itu, kebijakan pembangunan dalam pengembangan sektor ini sangatlah penting, walaupun akhir-akhir ini industri pengolahan terhempas akibat krisis ekonomi yang melanda perekonomian nasional.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2015

**Gambar 1.1 Presentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Jawa Barat, Februari 2015**

Keterangan:

1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
2. Industri Pengolahan
3. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel
4. Jasa Kemasyarakatan
5. Lainnya (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas & Air, Bangunan, Angkutan, Perdagangan, dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan).

Banyaknya tenaga kerja yang terserap oleh suatu sektor perekonomian, dapat digunakan untuk menggambarkan daya serap sektor perekonomian tersebut terhadap angkatan kerja. Masih tercatatnya jumlah pengangguran di

Jawa Barat menunjukkan bahwa angkatan kerja belum mampu diperdayakan secara optimal oleh berbagai kegiatan ekonomi yang ada. Kontribusi sektor industri yang besar terhadap perekonomian Jawa Barat belum mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia di pasar kerja lebih banyak lagi. Karena seperti terlihat pada Gambar 1.1 penyerapan tenaga kerja paling besar adalah dari sektor perdagangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yulia (2015) penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 dipengaruhi oleh variabel PDRB, UMK, PAD, dan pengangguran. Dengan hasil studi yang menunjukkan bahwa variabel PDRB memiliki hubungan yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan variabel UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota), PAD dan pengangguran mempunyai hubungan yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Dimas (2009) mengenai penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta menunjukkan bahwa PDRB, tingkat upah riil, dan investasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor industri di Jawa Barat, sehingga penulis mengambil judul **“Analisis Pengaruh UMK, Produktivitas Tenaga Kerja, dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di 26 Kabupaten/Kota Jawa Barat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh variabel Upah Minimum (UMK) terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri Jawa Barat ?
2. Bagaimana pengaruh variabel produktivitas tenaga kerja sektor industri terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri Jawa Barat ?
3. Bagaimana pengaruh variabel investasi sektor industri terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri Jawa Barat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh variabel Upah Minimum (UMK) terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri Jawa Barat.
2. Mengetahui pengaruh variabel produktivitas tenaga kerja sektor industri terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri Jawa Barat.
3. Mengetahui pengaruh variabel investasi sektor industri terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri Jawa Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan perumusan dan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan dalam rangka mengatasi masalah ketenagakerjaan, khususnya tenaga kerja sektor industri.
2. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menambah literatur dan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya.
3. Bagi publik, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai ketenagakerjaan di Jawa Barat, khususnya mengenai tenaga kerja sektor industri.